



Wajah **Otoritarianisme Digital** Dalam Silang Sengkabut **UU Cipta Kerja**

17 Desember 2020

Sesi Diskusi Omnibus
"Ruang Gerak Masyarakat Sipil Sesudah UU Cipta Kerja"
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

REGRESI DEMOKRASI DI INDONESIA

Kemunduran demokrasi terjadi ketika **seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis**, seringkali pemimpin yang menjanjikan dan kuat dan tegas, **secara bertahap mempersempit ruang untuk oposisi demokratis, membengkokkan lembaga-lembaga demokrasi pada kemauannya dan secara bertahap mengubah suatu negara menjadi demokrasi illiberal atau negara otoriter.**

Edward Aspinall dan Eve Warburton,
"Indonesia: The Dangers of Democratic Regression" (2018)

Sumber: <https://www.researchgate.net/publication/323180679>

Aspinall dan Warburton meminta kita memperhatikan **"tanda-tanda kerapuhan yang tumbuh"**.

Bagi Larry Diamond, Indonesia saat ini termasuk dalam kategori negara "demokrasi kurang liberal" bersama dengan Meksiko, Kolumbia, dan Thailand (sebelum kudeta 2014). Negara-negara ini tetap terkena risiko otoriter dan bahkan rentan terhadap kegagalan demokrasi.

Peristiwa dan tren dalam tiga tahun terakhir harus membuat kita **waspada terhadap "belok ke illiberal" di Indonesia dan kemungkinan nyata dari "dekonsolidasi demokratis"**.

SKOR DEMOKRASI TERUS MEROSOT

	Overall score	Global Rank	Regional rank	I Electoral process and pluralism	II Functioning of government	III Political participation	IV Political culture	V Civil liberties	Regime type
New Zealand	9.26	4	1	10.00	9.29	8.89	8.13	10.00	Full democracy
Australia	9.09	9	2	10.00	8.93	7.78	8.75	10.00	Full democracy
South Korea	8.00	23	3	9.17	7.86	7.22	7.50	8.24	Flawed democracy
Japan	7.99	24	4	8.75	8.21	6.67	7.50	8.82	Flawed democracy
Taiwan	7.73	31	5	9.58	8.21	6.11	5.63	9.12	Flawed democracy
Timor-Leste	7.19	41	6	9.58	6.29	5.56	6.88	7.65	Flawed democracy
Malaysia	7.16	43=	7	9.17	7.86	6.67	6.25	5.88	Flawed democracy
India	6.90	51	8	8.67	6.79	6.67	5.63	6.76	Flawed democracy
Philippines	6.64	54	9	9.17	5.36	7.22	4.38	7.06	Flawed democracy
Mongolia	6.50	62	10	9.17	5.71	5.56	5.00	7.06	Flawed democracy
Indonesia	6.48	64	11	7.92	7.14	6.11	5.63	5.59	Flawed democracy
Thailand	6.32	68	12	7.42	5.36	6.11	6.25	6.47	Flawed democracy
Sri Lanka	6.27	69	13	7.00	6.07	5.56	6.25	6.47	Flawed democracy
Papua New Guinea	6.03	74	14	6.92	6.07	3.89	5.63	7.65	Flawed democracy
Hong Kong	6.02	75=	15=	3.58	4.36	6.11	7.50	8.53	Flawed democracy
Singapore	6.02	75=	15=	3.92	7.86	5.00	6.25	7.06	Flawed democracy
Bangladesh	5.88	80	17	7.83	6.07	6.11	4.38	5.00	Hybrid regime
Fiji	5.85	81	18	6.58	5.36	6.11	5.63	5.59	Hybrid regime

Indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2016, Indonesia masih menduduki peringkat ke-48 dari 167 negara yang diteliti. Peringkat demokrasi Indonesia turun menjadi 64 pada tahun 2018, dengan skor hanya 6,39 - di peringkat terbawah kategori "demokrasi yang cacat". **The Economist Intelligence Unit**, 2019

Countries in Asia and the Pacific with declines in one to three aspects of civic space, 2013–2018

Extent of decline	Examples
Declines on all three aspects of civic space	India (moderate democratic backsliding), Thailand until 2019 (democratic breakdown 2014–2019)
Declines on two aspects of civic space	Pakistan (regressed to a hybrid regime in 2018)
Decline on one aspect of civic space	<p>Democracies: Indonesia, Mongolia and the Philippines (moderate democratic backsliding)</p> <p>Non-democracies: Cambodia, Tajikistan and Viet Nam</p>

Laporan **IDEA Global State of Democracy Indices** (2019) menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mengindikasikan penurunan salah satu aspek ruang sipil, khususnya dalam demokrasi.

Laporan **Freedom House (2020)** mencatat bahwa skor Indonesia kembali turun menjadi 61 dan menjelaskan bahwa Indonesia terus berjuang dengan tantangan termasuk korupsi sistemik, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, ketegangan separatis di wilayah Papua, dan penggunaan politik yang dipolitisasi, problem hukum pencemaran nama baik dan penistaan agama.

RANAH DIGITAL MENJADI ARENA PERTEMPURAN

"Social media can empower citizens, boost democracy, and help gauge the pulse of public opinion. However, there are also worrisome counterexamples of social media being used as a tool for repression", (E. Morozov, *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*, 2012)

POLARISASI MENGESAMPINGKAN DEMOKRASI



Milan W. Svolik

Deep social cleavages and acute political tensions—polarization, to use a term recently in vogue—undercut the public’s ability to curb the illiberal inclinations of elected politicians. In sharply polarized electorates, even voters who value democracy will be willing to sacrifice fair democratic competition for the sake of electing politicians who champion their interests. When punishing a leader’s authoritarian tendencies requires voting for a platform, party, or person that his supporters detest, many will find this too high a price to pay.

Polarization thus presents aspiring authoritarians with a structural opportunity: They can undermine democracy and get away with it.

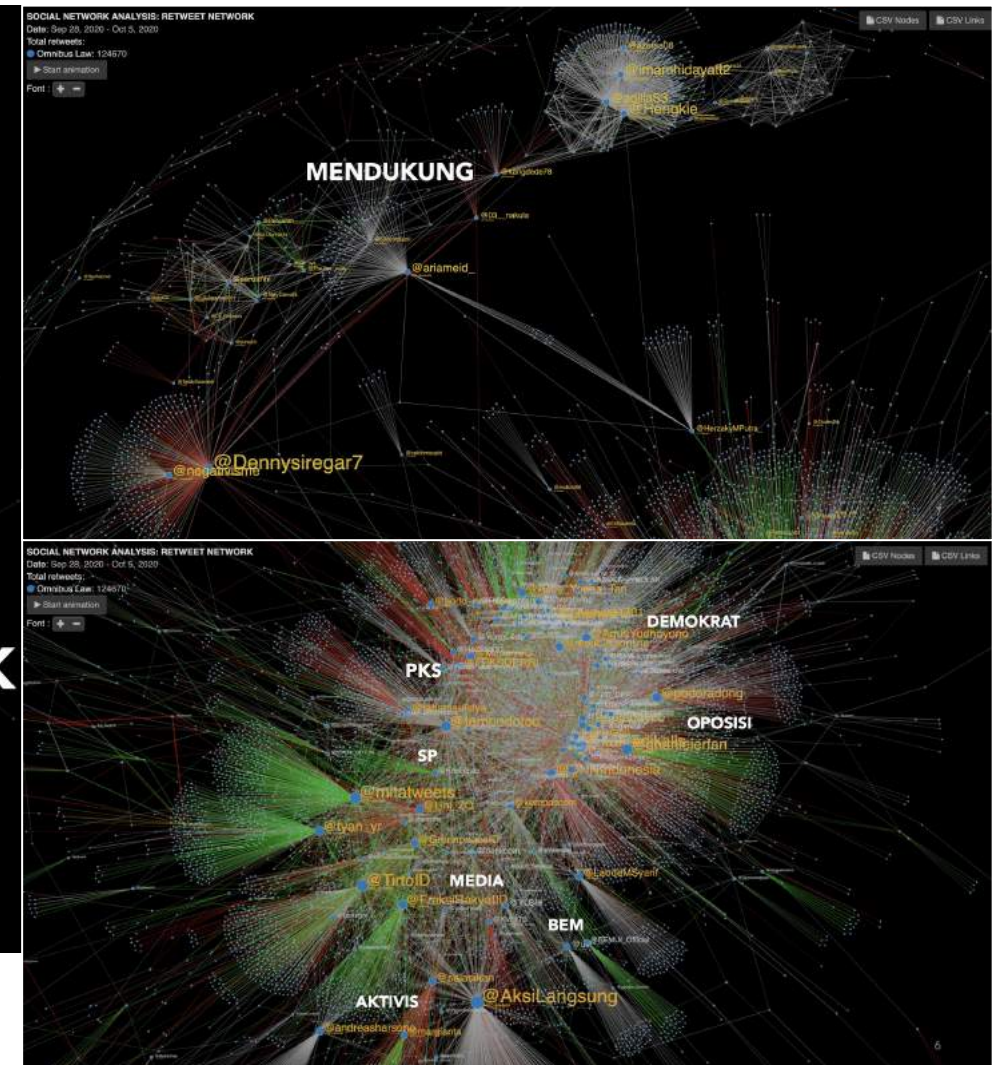
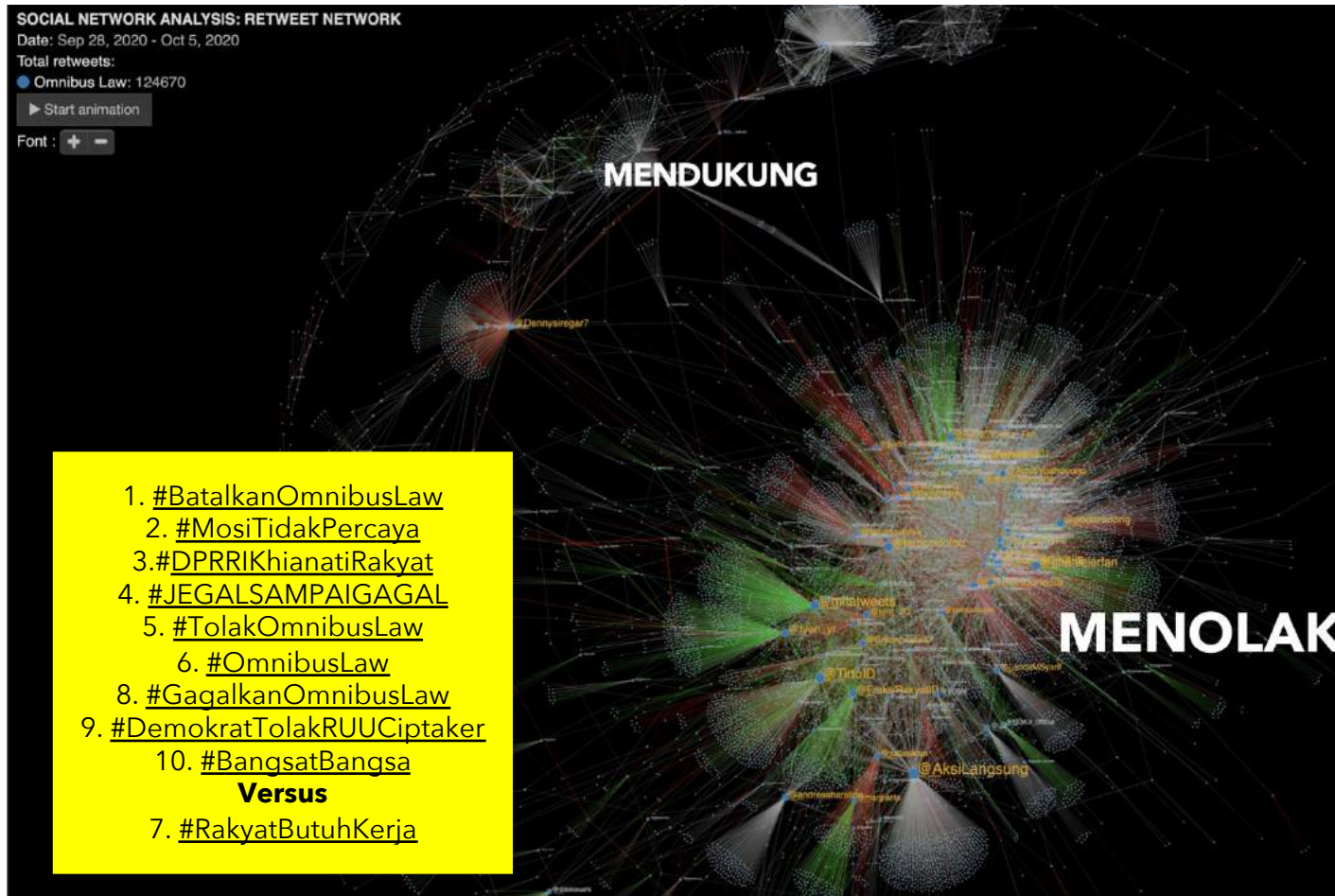
Sumber: Polarization versus Democracy, Journal of Democracy, Volume 30, Number 3, July 2019



DEMOKRASI
DIBUNUH
DIGITAL?

Dalam satu dekade terakhir, kondisi demokrasi (digital) menurun. Kita telah menyaksikan penyempitan ruang warga di ranah daring dengan represi yang hadir lewat teknologi digital.

SNA SEBELUM DISAHKAN



Jumlah penolak jauh lebih besar dan makin membesar.

Sumber: <https://pers.droneemprit.id/omnibus-lawpeta-aspirasi-publik-di-media-sosial/>

WEAPONIZATION OF SOCIAL MEDIA

Disinformasi



Akun Facebook *Ahok for Indonesia* pada 13 Oktober 2020 mengunggah pernyataan tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mendukung UU Cipta Kerja. Konten ini viral setelah 144 kali dibagikan dan mendapatkan 376 komentar warganet.

Sumber: <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4389135/cek-fakta-hoaks-pernyataan-buya-syafii-maarif-soal-omnibus-law-cipta-kerja>

JawaPos.com

BERITA TERBARU NASIONAL IBU KOTA BARU PANDEMI ENTERTAINMENT KABAR DAERAH SEPAK BOLA INDONESIA

Home > Nasional > Politik

Beredar Hoax Pernyataan Buya Syafii Soal UU Omnibus Law Cipta Kerja

POLITIK 15 Oktober 2020, 11:19:41 WIB



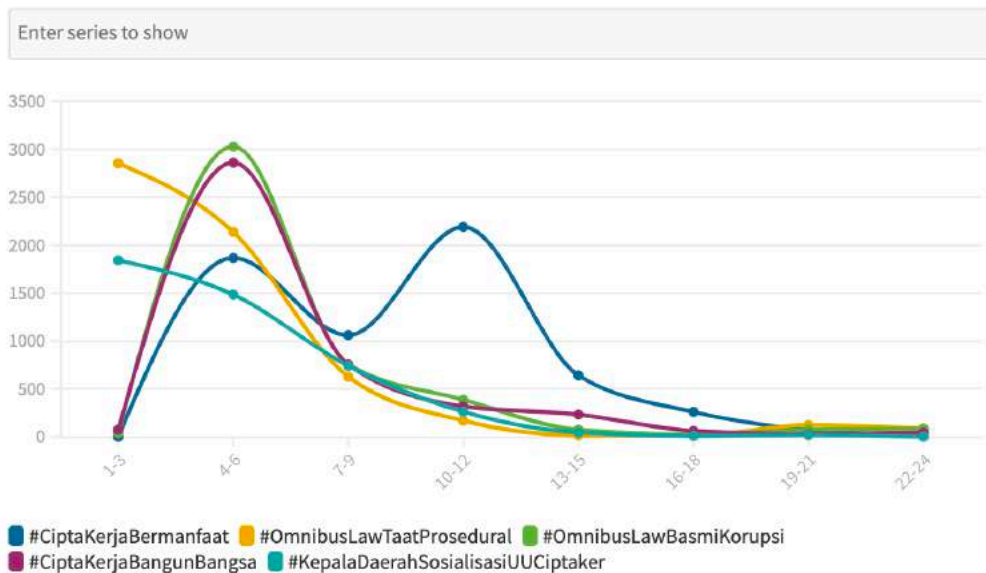
Sumber: <https://www.jawapos.com/nasional/politik/15/10/2020/beredar-hoax-pernyataan-buya-syafii-soal-uu-omnibus-law-cipta-kerja/>

WEAPONIZATION OF SOCIAL MEDIA



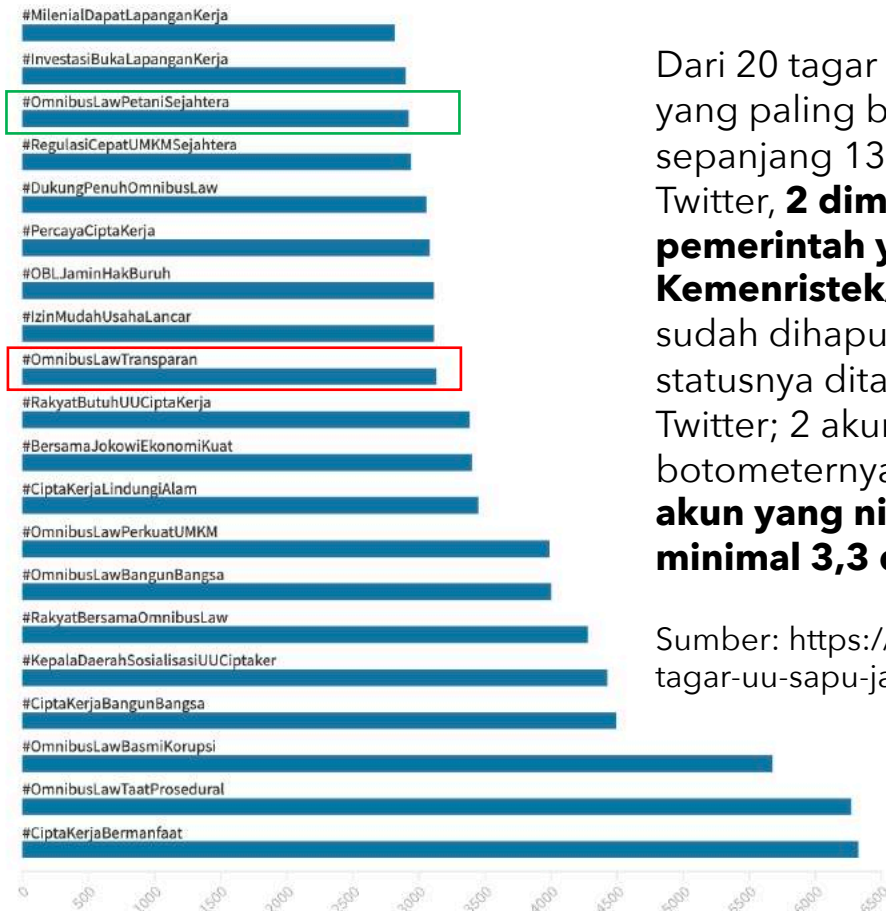
Mobilisasi Opini

Performa 5 Tagar Pro-UU Cipta Kerja Terbanyak Digunakan dalam 24 Jam Pertama
13-27 Oktober 2020



Akun resmi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pertama kali menggunakan tagar #OmnibusLawTransparan pada Rabu, 14 Oktober 2020 Pukul 10.36 WIB. Hanya dalam waktu kurang dari 90 menit setelah itu, tagar ini sudah muncul dalam 1.173 cuitan. Tagar ini sempat duduk di urutan kelima *trending topic* Indonesia pada Pukul 12.00 WIB.

20 Tagar Pro-UU Cipta Kerja yang Paling Banyak Dicitkan
13-27 Oktober 2020



Dari 20 tagar pro-UU Cipta Kerja yang paling banyak digunakan sepanjang 13-27 Oktober 2020 di Twitter, **2 dimulai oleh akun pemerintah yaitu BNPT & Kemenristek/BRIN**; 1 akun yang sudah dihapus; 4 akun yang statusnya ditangguhkan oleh Twitter; 2 akun yang nilai botometernya maksimal 2; dan **10 akun yang nilai botometernya minimal 3,3 dan maksimal 4,8**.

Sumber: <https://jaring.id/bagaimana-tagar-uu-sapu-jagat-menjadi-viral/>

WEAPONIZATION OF SOCIAL MEDIA

Operasi Artis



Kata Kunci...

BERANDA

VIDEO

EPAPER

SELEBRITI

Ardhito Pramono Akui Dibayar Rp10 Juta, Ini Daftar 22 Artis yang Unggah #IndonesiaButuhKerja

Hiburan

Sabtu, 15 Agustus 2020 15:28



258.585 tayangan

pergijauh Salam sekut! • Keadaan pandemi ini buat segala sesuatunya jadi serba terbatas. Tapi gue juga gak mau diem aja tanpa ngapain-ngapain, gue tetep bertahan dan salurin energi gue untuk bikin dan jalanin strategi baru untuk ngadepin tantangan ini.

Balik fokus ke diri sendiri, jalanin apa yang kita bisa. Tetep aktif dan produktif sampai masa pandemi ini berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Karena gue butuh kerja, lo butuh kerja dan #IndonesiaButuhKerja

Lihat semua 338 komentar

8:29 PM · Aug 12, 2020

382 182 people are Tweeting about this



575,624 views

ardhitopramono Kegiatan saat dirumah doang. Jadi kangen kerja, gue butuh kerja, lo butuh kerja #IndonesiaButuhKerja

9:25 PM · Aug 12, 2020

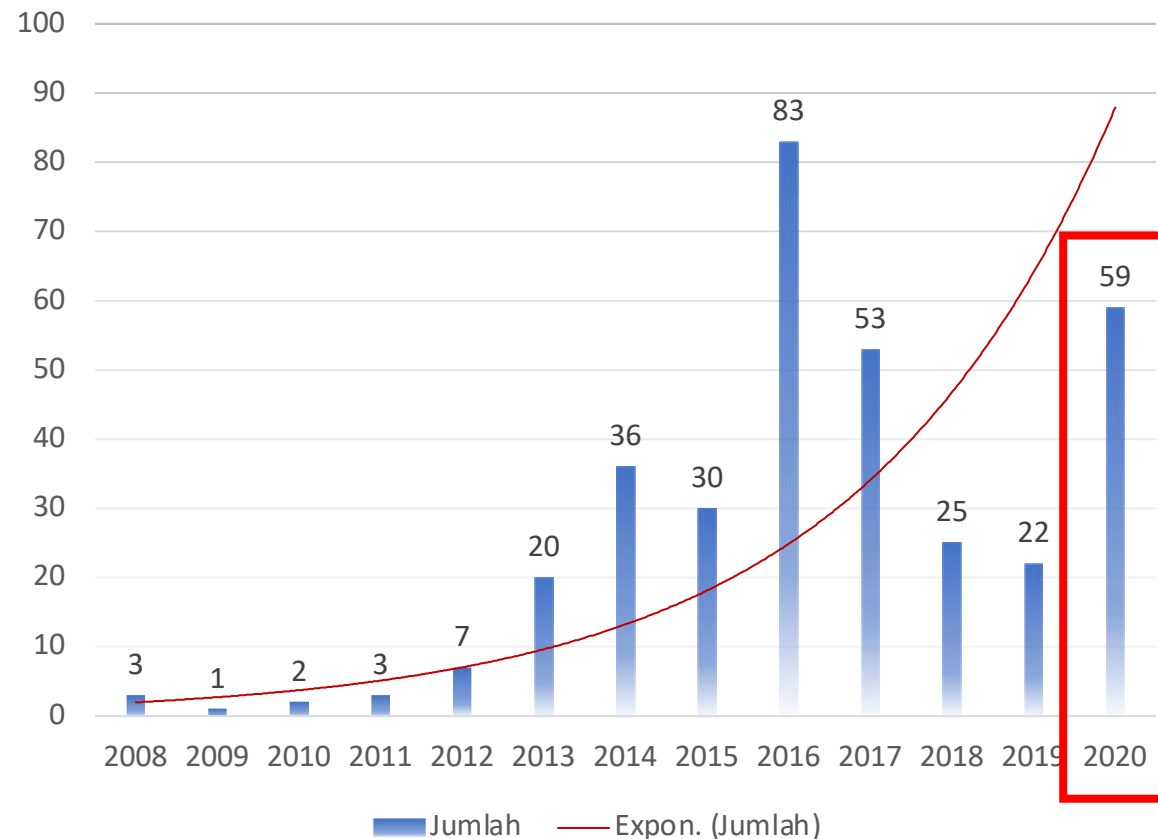
Tagar #IndonesiaButuhKerja dimuat secara bersamaan oleh **22 artis/influencer berbayaran Rp 5-10 juta.**

1. Gofar Hilman
2. Inul Daratista
3. Cita Citata
4. Valentino 'Jebrett' Simanjuntak
5. Rigen Rakelna & Boris Bokir
6. Aruan Marsha
7. Kim Kurniawan (Pesepakbola)
8. Gisella Anastasia
9. Gading Marten
10. Siti Badriah
11. Gritte Agatha
12. Fitri Tropica
13. Gita Bhebhita
14. Caesa Gunawan
15. Zahwa Aqilah
16. Ismed Sofyan (Pesepkabola)
17. Ardhito Pramono
18. Adhe Giovani (Youtuber)
19. Alain Goenawan (Video Director)
20. Tiyo Adji (Youtuber)
21. Aisyah Fabien (Podcaster)
22. Adit Insomnia

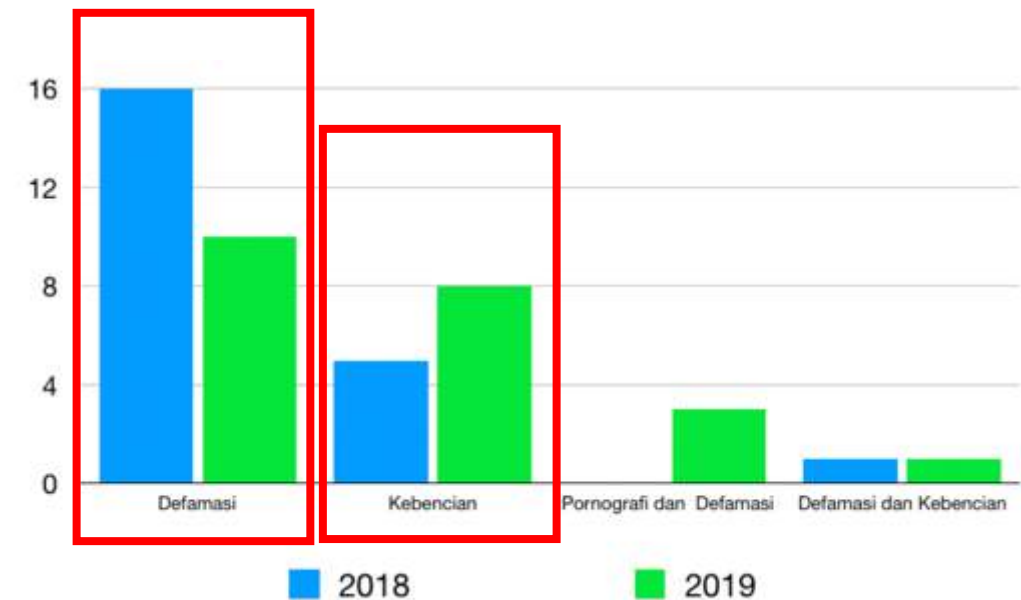
WEAPONIZATION OF LAW

CATATAN SAFENET

JUMLAH KASUS PEMIDANAAN UU ITE



KATEGORI PASAL PEMIDANAAN UU ITE



Sumber: Database SAFEnet, Oktober 2020

Sumber: Laporan Tahunan SAFEnet 2019

WEAPONIZATION OF LAW

2

SURAT TELEGRAM KAPOLRI
NOMOR : STR/ 645 /X/PAM.3.2./2020
TANGGAL : 2 - 10 - 2020

SATU TTK MELAKSANAKAN GIAT FUNGSI INTELIJEN DAN DETEKSI DINI SERTA DETEKSI AKSI TERHADAP ELEMEN BURUH DAN MASY GUNA MENCEGAH TERJADINYA AKSI UNRAS DAN MOGOK KERJA YG DAPAT MENIMBULKAN AKSI ANARKIS DAN KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH MASING-MASING TTK

DUA TTK MAPPING PERUSAHAAN/SENTRA PRODUKSI STRATEGIS JAMINAN AKSA IKUT

Surat Telegram Kapolri No. STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 GUNA

EMPT TTK MELAKUKAN KOORDINASI DAN BANGUN KOMUNIKASI YG EFEKTIF DGN APINDO KMA DISNAKER KMA TOKOH BURUH KMA MAHASISWA DAN ELEMEN MASY LAINNYA DLM RANGKA MEMELIHARA SITKAMTIBMAS KONDUSIF DITENGAH PANDEMI COVID-19 TTK

LIMA TTK LAKUKAN CYBER PATROL PADA MEDSOS DAN MANAJEMEN MEDIA UTK BANGUN OPINI PUBLIK YG TDK SETUJU DGN AKSI UNRAS DI TENGAH PADEMI COVID-19 TTK

ENAM TTK LAKUKAN KONTRA NARASI ISU-ISU YG MENDISKREDITKAN PEMERINTAH TTK

TUJH TTK SECARA TEGAS TDK MEMBERIKAN IZIN KEGIATAN BAIK UNJUK RASA MAUPUN IZIN KERAMAIAAN LAINNYA TTK

DLPN TTK UPAYA HARUS DILAKUKAN DI HULU (TITIK AWAL SEBELUM KUMPUL) KMA DAN LAKUKAN PAM TERBUKA DAN TERTUTUP TTK

Menu

Cari berita...

Bisnis.com

Tujuh Provokator Demo Omnibus Law di Medsos Dijerat Pasal Berlapis

Tiga dari tujuh orang tersangka yang diamankan itu merupakan admin dari Grup Whatsapp STM Se-Jabodetabek.



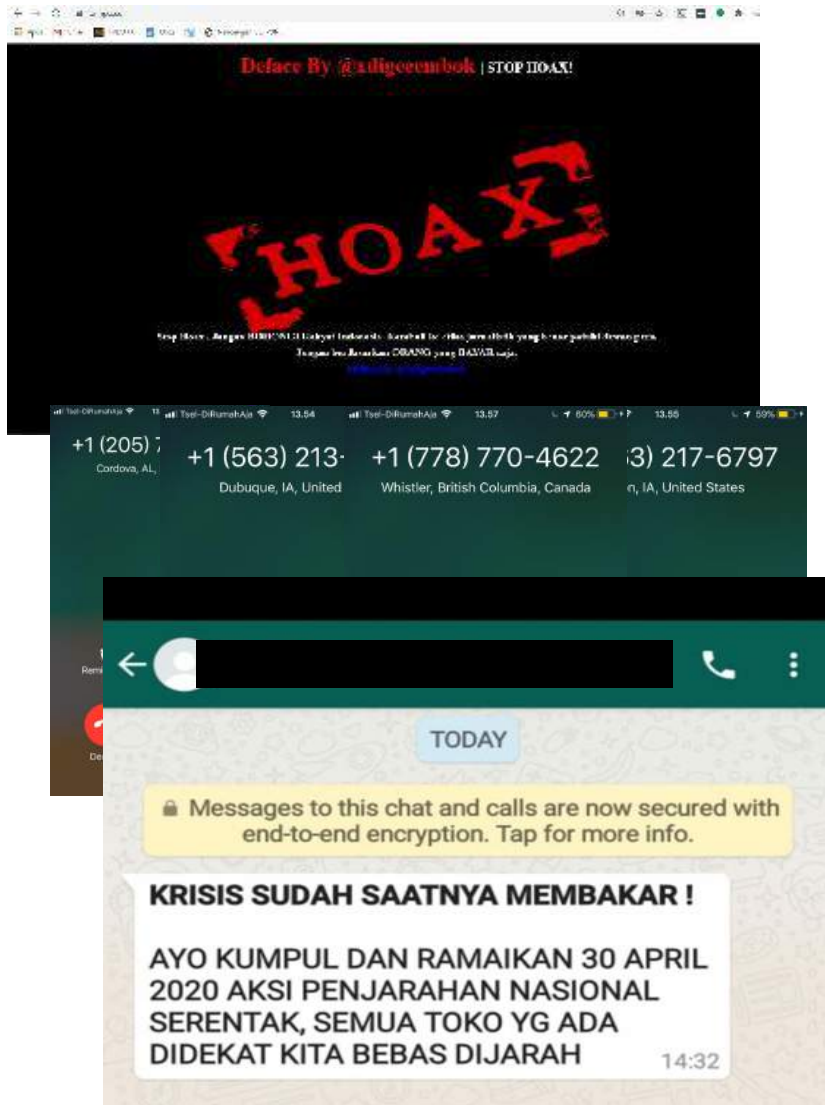
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com

20 Oktober 2020 | 10:44 WIB



7 orang yang mengajak demonstrasi menolak Omnibus Law lewat media sosial dijadikan tersangka dengan Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP dan/atau Pasal 214 KUHP dan/atau Pasal 211 KUHP dan/atau Pasal 212 KUHP dan/atau Pasal 216 KUHP dan/atau Pasal 218 KUHP dan/atau Pasal 358 KUHP Jo Pasal 55, Pasal 56 KUHP. Ditambah **pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 UU ITE.**

WEAPONIZATION OF TECHNOLOGY



Serangan Siber Terarah adalah upaya terus-menerus untuk menyusup dan menginfiltrasi ke perangkat dan infrastruktur jaringan dari individu, kelompok, organisasi, dan komunitas tertentu.

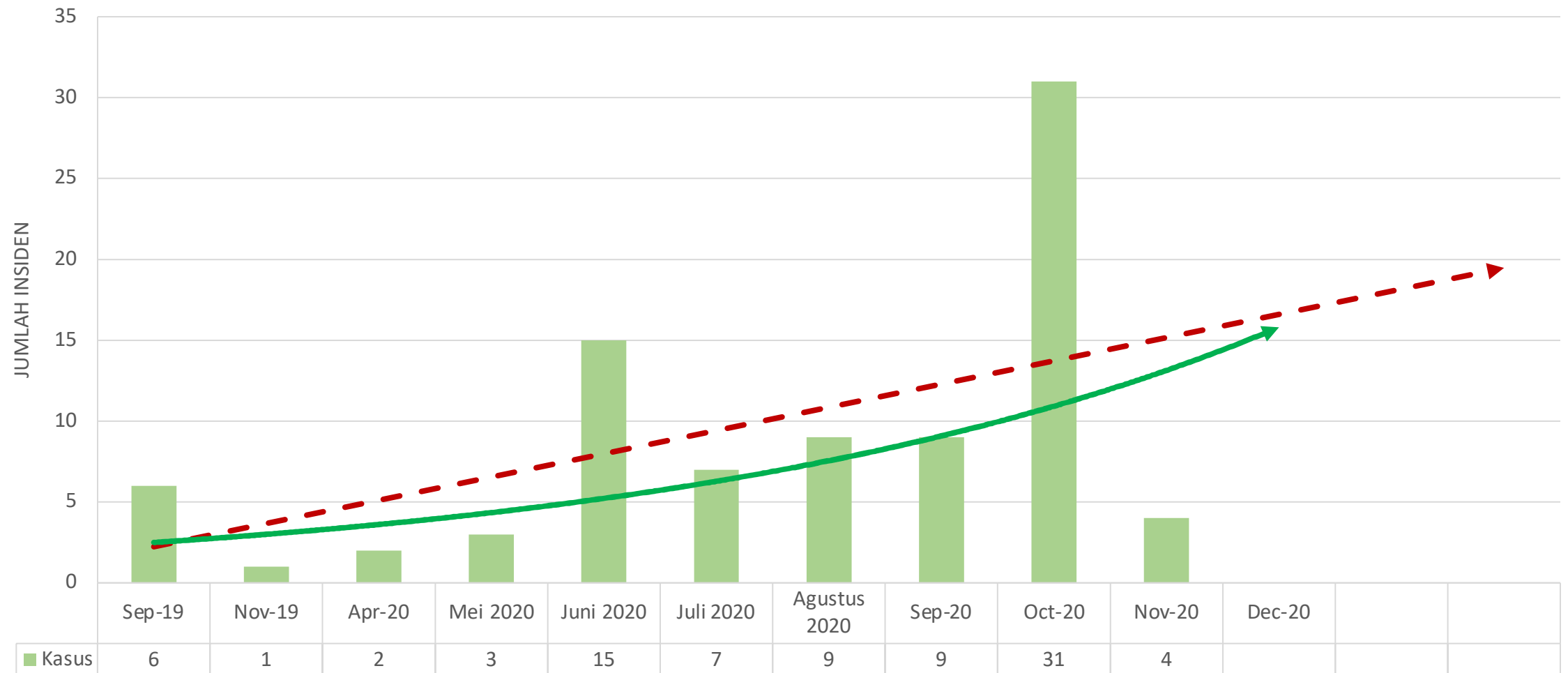
Serangan siber yang terarah dan sistematis ini bukan seperti spam atau penipuan finansial biasa yang mungkin ditemui secara acak di Internet.

Sebaliknya, serangan siber jenis ini **berfokus pada target tertentu**, yakni kelompok beresiko seperti jurnalis, akademisi, aktivis mahasiswa, pembela HAM, pejuang masyarakat adat, aktivis lingkungan, aktivis anti korupsi, jurnalis/aktivis perempuan dan serangan siber ini dimotivasi oleh tujuan politik.

WEAPONIZATION OF TECHNOLOGY

Oktober 2020: 31 serangan digital

KASUS



WEAPONIZATION OF TECHNOLOGY

Doxing - Terror



Pada 19 Oktober 2020 beredar konten berupa foto, video, lokasi, nomer induk mahasiswa, nomer telepon disertai narasi memframe "tokoh penggerak demo berakhir rusuh di Yogyakarta" pada Azhar Jusardi Putra, Ernawati, Ardy Syihab di WhatsApp dan diunggah akun Instagram @swordofficial dan @NCI4NKRI serta akun Twitter @demoanarki dan @NCI4NKRI

<https://twitter.com/demoanarki/status/1320529472936943616?s=21>

Akun Whatsapp Jusardi diambilalih.

Pada 20 Oktober 2020, ibu dari Jusardi menerima ancaman pembunuhan dari nomer telpon yang dibagikan oleh akun @demoanarki

Sumber:

<https://koran.tempo.co/read/nasional/459216/penolak-omnibus-law-jadi-korban-serangan-doxing>

WEAPONIZATION OF TECHNOLOGY

Hacking

2020

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

Akun twitter @RumahAMAN dan email AMAN diduga diretas.



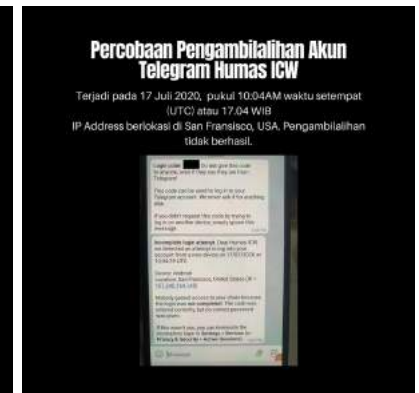
WAHANA LINGKUNGAN HIDUP

Peretasan website Walhi, dengan teknik defacing pada halaman donasi.walhi.or.id diganti.



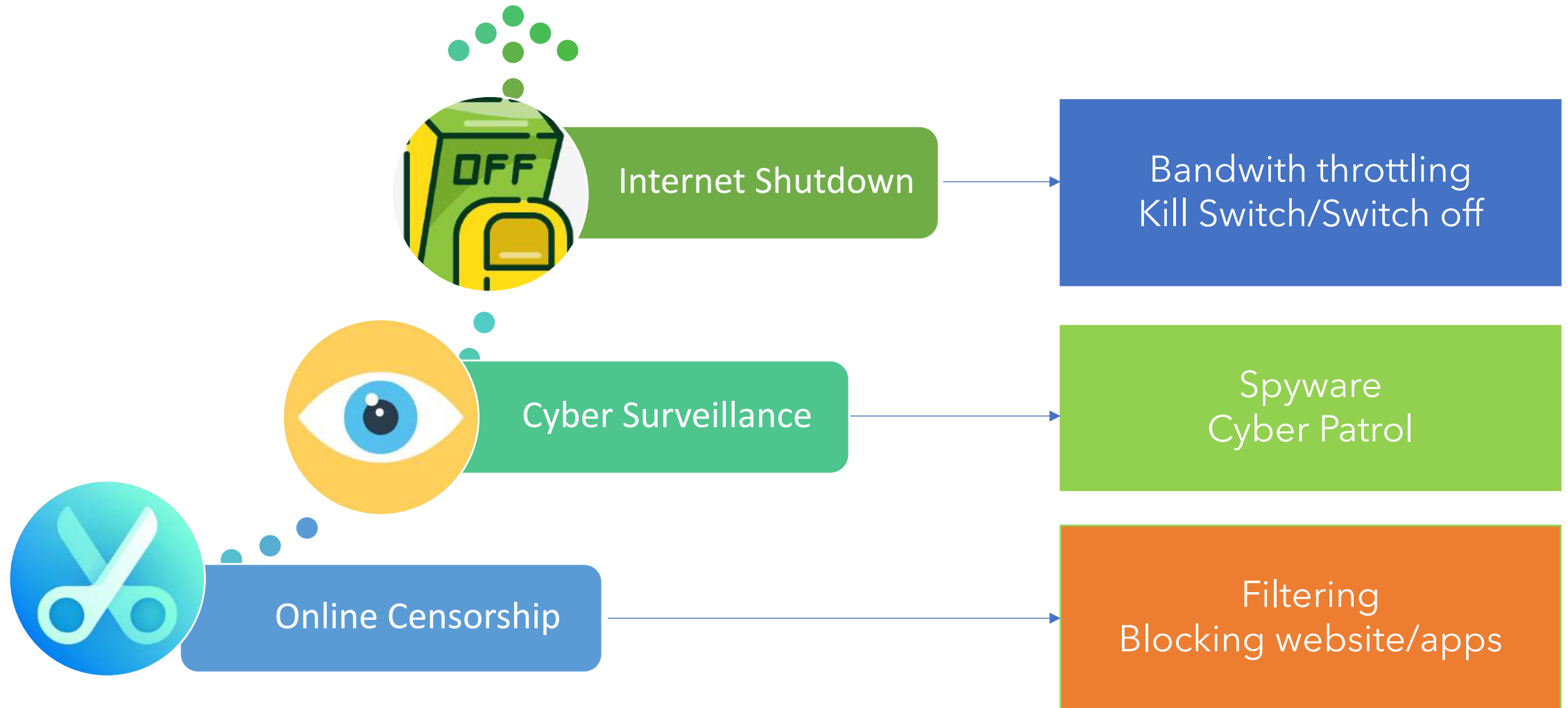
INDONESIA CORRUPTION WATCH

Peretasan 2 akun Instagram dan percobaan pengambilan akun humas ICW di Telegram Sudah dilaporkan ke Platform



PRAKTIK OTORITARIANISME DIGITAL

Laporan Situasi Hak Digital 2019 Indonesia telah dinyatakan status “siaga satu” menghadapi Otoritarianisme Digital.



PEMBELAJARAN BERSAMA

- Mayantara yang diharapkan menjadi ruang subur demokrasi (utopia) telah menjadi ruang yang anti-demokrasi karena disinformasi, mobilisasi opini, propaganda komputasi (*technological dystopia*).
- Demokrasi (digital) direpresi dengan *weaponization of social media, law, technology* sehingga *online civic space* menyempit.
- Serangan siber terarah dialami oleh kelompok beresiko: pembela HAM, aktivis, akademik (termasuk mahasiswa).
- Represi teknologi merupakan karakter utama dari Otoritarianisme Digital dan bila dibiarkan akan membuat kehancuran demokrasi.
- Kelompok masyarakat sipil banyak yang belum punya standar keamanan digital dalam melindungi dirinya dari kemungkinan serangan digital.

ANTISIPASI KE DEPAN

LEWAT JALUR HUKUM

LITERASI KEAMANAN DIGITAL

KONSOLIDASI GERAKAN & DUKUNGAN



Terima kasih.
Semoga berguna
dan bermanfaat.

Social media

@SAFENETVOICE

Nomor Hotline

08119223375

info@safenet.or.id

